

SWASTANISASI PERKEBUNAN TEH DI BOGOR 1905—1942

Nurbaity dan Saring

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI
Email : nurbaity_muthalib@yahoo.com/08121997655

Abstract : *Indonesia known as Nusantara by East-Indies had greatest natural sources. The search of spices in East-Indies by the westners of Europe had been done since the emerge of compass and shipping technology. The potential of Nusantara's natural resources commodities sold out in world's market forced west countries to compete and gained much more benefits. Those benefits too-and yet become the motivation of the west to occupy the land. The more greater power to the west then later be implemented through several rules and obligations including in economic called cultuurstelsel. The cultuurstelsel then later be changed within the involvement of private sector in it and given their investment. One of the investment in occupied land is the acquisition of tea plantation in Cipanas Bogor. This acquisition of tea plantation become private sector had marked his own periode in the history of plantation in Indonesia.*

Keywords: *Cultuurstelsel, export commodities, private plantation, Bogor*

Abstrak : Indonesia yang dahulu dikenal dengan Nusantara atau bangsa Barat kolonial menyebutnya dengan Hindia Belanda memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Pencarian wilayah Hindia Belanda sebagai penghasil rempah-rempah sudah diincar oleh bangsa-bangsa Barat khususnya dari Eropa sejak adanya kompas dan teknologi kapal laut. Potensi alam Nusantara sebagai penghasil tanaman yang laku di pasaran dunia menyebabkan bangsa-bangsa Barat berkompetisi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang besar itu pula yang menjadi motivasi bangsa-bangsa Barat menancapkan kekuasaannya di Nusantara. Kekuasaan yang semakin besar itu diwujudkan dengan menerapkan segala kebijakan atau peraturan kolonial salah satunya mengenai perekonomian wilayah jajahan. Diantara kebijakan di bidang perekonomian yang diterapkan oleh kolonial Belanda di Hindia Belanda adalah *cultuurstelsel* yang kemudian digantikan dengan sistem baru yang lebih terbuka dengan mengikutsertakan para pengusaha swasta untuk memberikan investasi di tanah jajahan. Salah satu pengelolaan tanah jajahan oleh pihak swasta asing adalah perkebunan teh di Cipanas Bogor. Akuisisi status perkebunan ke arah swastanisasi ini menjadi satu periode tersendiri dari sejarah perkebunan di Indonesia.

Kata kunci: *cultuurstelsel*, tanaman ekspor, perkebunan swasta, Bogor.

PENDAHULUAN

Pembahasan sejarah dengan menempatkan tema mengenai sejarah perkebunan dan pertanian, merupakan tema yang sudah banyak diulas dan diteliti oleh banyak penulis sejarah profesional maupun amatir. Bukanlah satu hal yang mengejutkan karena perkebunan dan pertanian memang menjadi sebuah fenomena/ gejala yang inheren dengan aspek historisitas bangsa ini. Selain tema-tema mengenai kehidupan maritim, perniagaan dan industrialisasi berat di Indonesia, tema mengenai sejarah perkebunan memiliki tempat tersendiri dalam rumpun bahasan mengenai sejarah sosial-ekonomi di Indonesia. Pembahasan mengenai sejarah

perkebunan cukup menarik dan selalu memberikan warna tersendiri, hal tersebut dikarenakan: 1. Perbedaan tanaman komoditi yang ditanam di wilayah perkebunan; 2. Ekologi lingkungan yang berbeda-beda di setiap wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya industri perkebunan; 3. Ketersediaan sumber daya manusia dan keterampilannya dalam mengusahakan perkebunan, dan; 4. Dinamika sosial serta politis yang menyertai perkembangan perkebunan dalam beberapa bentuk gerakan-gerakan sosial.

Beraneka ragam tinjauan dan sudut pandang dalam melihat persoalan-persoalan dalam tema sejarah perkebunan inilah yang cukup banyak memberikan khasanah wawasan mengenai tema sejarah perkebunan. Beberapa

kajian mengenai tema sejarah perkebunan yang pernah dilahirkan oleh para penulis sejarah, secara umum berkonsentrasi atau mengambil latar sosial (wilayah) di sekitar wilayah Priangan, Jawa Bagian Tengah dan Timur, serta di sekitar wilayah pantai timur Sumatera. Khususnya untuk tema sejarah perkebunan di wilayah Priangan, kajian mengenai sejarah perkebunan teh di daerah Bogor (wilayah ujung barat dari daerah Priangan) sedikit sekali tulisan-tulisan yang membahasnya. Beberapa kajian yang pernah lahir biasanya sangat umum dan didominasi oleh tinjauan mengenai pertanian.

Lebih jauh untuk dapat memahami sejarah perkebunan di Indonesia, khususnya perkebunan teh di wilayah Bogor, memang tidak dapat dilepaskan dari bagaimana keadaan sejarah Indonesia pada masa penguasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda (Padmo, 2004: 4). Perkebunan teh di wilayah Bogor pada awalnya berkembang setelah dilakukan uji coba penanamannya di Kebun Raya Bogor, areal sekitar istana atau tempat peristirahatan Gubernur Jenderal pada abad ke-17 (P.J. van Dooren, *et al.*, 1975: 77). Pada saat itu, tanaman teh dibawa ke Hindia Belanda dan ditanam di areal pekarangan rumah Gubernur Jenderal di Bogor. Setelah penanaman teh tersebut berhasil, barulah kemudian tanaman teh mulai ditanam di beberapa daerah di Jawa, khususnya di wilayah Bogor sebagai tanaman komoditi perdagangan.

Sejarah perkembangan perkebunan teh di wilayah Bogor berubah pesat ketika pemerintah kolonial Belanda memasukan tanaman tersebut sebagai komoditi utama ekspor dari Hindia Belanda, bertarung melawan tanaman teh yang berasal dari India, dan Cina. Era perkembangan teh yang sebelumnya diusahakan oleh sebagian kalangan (keluarga) Eropa dari masa VOC, bergeser dan diambil alih oleh pemerintah kolonial. Hal ini dapat dilihat pada saat pemerintah kolonial melalui Gubernur Jendral Van Den Bosch mengeluarkan kebijakan *cultuurstelsel* (tanam paksa), dimana tanaman teh masuk sebagai tanaman yang diusahakan oleh pemerintah dan sebagai salah satu tanaman ekspor utama dari Hindia Belanda (Padmo, 2004: 154).

Perdagangan dan perniagaan komoditi tanaman teh yang berlangsung pada masa tanam paksa di Hindia Belanda, pada perjalanannya ternyata tidak semulus yang diharapkan oleh

pemerintah kolonial. Komoditi tanaman teh sebagai salah satu jenis komoditi ekspor lambat laun ternyata kurang mendapat perhatian dalam pasar internasional (Van Erden dan Deijs, 1946: 69). Jenis komoditi tanaman teh tidak dapat mengimbangi pesatnya permintaan komoditi lainnya seperti gula, kopi, beras, kopra dan karet. Berdasarkan keadaan yang demikian maka pemerintah setelah berakhirnya kebijakan *cultuurstelsel* (tanam paksa), mengalihkan perusahaan tanaman teh kepada pihak swasta (Padmo, 2004: 69), tidak terkecuali juga keberadaan perkebunan teh yang berada di wilayah Bogor, turut pula beralih dikuasai oleh pihak swasta.

Proses swastanisasi, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan proses transisi pengelolaan perkebunan teh di Hindia Belanda, khususnya perkebunan teh di Bogor (Jawa Barat) pada akhir abad ke-19, hingga mencapai akhir penguasaan pemerintahan kolonial Belanda. Dinamika proses swastanisasi perkebunan teh di Hindia Belanda secara umum dapat dipahami sebagai masa-masa akselerasi percepatan dan pertumbuhan dari industrialisasi perkebunan. Masuknya sistem uang (monetisasi), perubahan pengelolaan perkebunan dengan menggunakan pendekatan organisasi dan manajemen yang lebih modern, adaptasi para penduduk pribumi terhadap tanaman komoditi teh, keberadaan pabrik-pabrik teh sebagai mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat, hingga proses penyiasatan perkebunan teh dalam menghadapi krisis ekonomi (depresi ekonomi) di tahun 1930, merupakan serangkaian peristiwa yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit penjelasan yang komprehensif mengenai rangkaian peristiwa tersebut, dengan tetap menekankan aspek masalah (*problem oriented*) dalam menjawab sebuah pertanyaan dasar yakni bagaimana memahami dinamika perkebunan teh di Bogor pada masa swastanisasi (*corporatisasi*) besar-besaran di Hindia Belanda.

Gambaran Ekologi Bogor (Keadaan Geografi, Ekonomi dan Penduduk)

Daerah Bogor yang memiliki kondisi geografis sebagai daerah pegunungan, memiliki tanah yang subur guna membangun mode produksi agraria (pertanian dan perkebunan).

Bentuk geografis tersebut memberikan kesempatan bagi kota Bogor bertumpu pada tanah sebagai alat produksi, dan sudah barang tentu akan mempengaruhi pola berpikir, perilaku dan pandangan-pandangan tentang kehidupan masyarakat di daerah Bogor. Daerah Bogor atau juga dikenal dengan nama tanah Sunda (dahulunya kerajaan Pajajaran, kerajaan yang menganut ajaran agama Hindu) berdiri di atas daerah yang cukup luas. Secara geografis, Bogor merupakan salah satu wilayah dari tanah Priangan, sebagai tempat lahir dan berkembangnya kebudayaan Sunda.

Secara geografis kota Bogor terletak diantara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis kota Bogor di tengah-tengah wilayah kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan ibukota negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26°C dengan suhu terendah 21,8°C dengan suhu tertinggi 30,4°C. Kelembaban udara 70 %, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari (kotabogor.go.id).

Harsojo (2004) mengatakan bahwa secara antropologi-budaya, bahwa yang disebut suku Sunda adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa ibu, bahasa Sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari dan berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, daerah yang juga sering disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Tanah yang subur dengan perpaduan dataran rendah serta daerah pegunungan, memberikan konsekuensi berupa kelimpahan atas hasil bumi yang besar menjadi identitas bagi daerah Bogor. Hal inilah yang membuat penguasa kolonial Belanda saat itu, membangun jalan Daendels untuk menghubungkan daerah Bogor dengan daerah Priangan dan daerah pesisir pantai.

Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada tanah ini yang kemudian memberikan sistem produksi masyarakat Bogor menggunakan cara bekerja sama dalam mengelola produksi ekonominya. Tata cara pengelolaan ekonomi inilah yang kemudian menempatkan tanah sebagai alat produksi dengan model

kepemilikan secara perseorangan, namun dalam penggarapannya menjadi tanggung jawab bersama yang menempati dan menggunakan tanah tersebut untuk tempat tinggal atau berproduksi.

Kepemilikan atas tanah di daerah Jawa Barat, didasarkan atas pengelolaan tanah yang sudah dilakukan sejak masa sebelum VOC masuk. Dengan seperti itu pemilikan atas tanah di Jawa Barat didasarkan atas pengelolaan dan pemilikannya yang bersifat turun-temurun kepada generasi berikutnya (kepemilikan secara pribadi) disebut *Balong*. Hal tersebut dapat dilihat melalui laporan survey berjudul *Eindresume van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander*. Survey yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda tahun 1869 di Jawa Barat ini membuktikan bahwa sebagian besar desa-desa di sepanjang daerah Jawa bagian Barat tanah yang dimiliki perseorangan jauh lebih banyak dan luas dari pada tanah yang dimiliki secara komunal, berbeda dengan daerah di Jawa bagian tengah, keadaannya justru sebaliknya (Harsojo dan Koentjaraningrat (ed), 2004: 307). Kepemilikan tanah dalam masyarakat Bogor, memberikan dampak berupa naiknya status sosial bagi sang pemilik tanah dalam stratifikasi sosial masyarakatnya. Penguasaan atas sumber produksi menjadi landasan munculnya kepemilikan pribadi sebagai konsep yang memberikan legalitas terhadap pengertian kerja. Berdasarkan penjelasan kepemilikan sumber produksi tersebut, maka terdapat satu pemahaman yang lazimnya terbangun bahwa, dalam masyarakat agraris, tanah merupakan sumber produksi dan kekayaan yang utama, dan karenanya pemilikannya membawa prestise yang tinggi; sebagai akibatnya maka klasifikasi penduduk desa yang tradisional didasarkan atas kepemilikan tanah (Kartodirdjo, 1972: 56).

Gambaran tentang terdapat kelompok-kelompok yang memiliki penguasaan atas sumber produksi dan alat produksi ini yang sekiranya menjelaskan kepada kita tentang kemampuan untuk memproduksi ide-ide serta gagasan dan pemikiran mengenai konsepsi filosofis masyarakat tradisional. Dengan ini maka kita mendapat petunjuk tentang golongan sosial mana yang memiliki otoritas (berupa pengaruh dan kemampuan secara politis) terhadap seluruh lapisan sosial masyarakat Bogor.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat tradisional Bogor yang juga termasuk dalam masyarakat Jawa Barat, terbentuk atas dasar nilai-nilai dan pengetahuan yang bersumber dari sistem nilai agama Hindu, yang berasal dari luar Nusantara sebagai sebuah konsekuensi dinamika sosial masyarakat Jawa Barat dengan kelompok masyarakat di luar Nusantara (India dan Cina). Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Jawa Barat seperti Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu. Selain itu dalam hikayat atau sejarah masyarakat Jawa Barat juga dituliskan, kalau masyarakat Jawa Barat juga mengadopsi nilai-nilai agama Islam, yang diwujudkan dengan berdirinya Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.

Organisasi Produksi Perkebunan Teh di Bogor Hingga Akhir Masa Sistem Tanam Paksa

Pada abad ke -17, sebagai masa-masa awal pengusahaan tanaman teh di Bogor, konstruksi masyarakat Bogor pada masa tersebut, (tiga kelas utama yang berhubungan dengan aktivitas produksi tanaman komoditi teh) tersebut dihubungkan dengan sebuah sistem yang disebut dengan sistem upeti dan kerja wajib (Burger, 1957: 110). Sistem upeti dalam bentuk penyerahan pajak hasil bumi dan kerja wajib ini, merupakan konsekuensi dari konsep penguasaan alat produksi dan pengelolaan alat dan sumber produksi. Istana atau para penguasa lembaga politik tradisional merupakan kelas yang memiliki dan menguasai alat dan sumber-sumber produksi, sementara rakyat kebanyakan ialah para pekerja yang melakukan pengelolaan atas alat-alat produksi dan sumber produksi (Kuntowijoyo, 2002: 112). Dalam konteks inilah, rakyat kemudian terikat oleh kewajiban-kewajiban atas tanah yang digunakan untuk dapat bertahan hidup. Kewajiban-kewajiban inilah yang kemudian menjadi semacam tugas bagi para rakyat atau tani hamba yang menjadi tulang punggung penggerak aktivitas ekonomi masyarakat tradisional (Burger dan Parajudi, 1962: 240). Golongan-golongan khusus yang memiliki kewajiban pekerjaan ini terdiri dari keluarga-keluarga di pedesaan. Golongan keluarga pedesaan tersebut adalah masyarakat biasa atau masyarakat kecil yang bekerja sebagai petani,

pedagang tukang, nelayan, dan lainnya (Burger, 1957: 110).

Golongan bawah masyarakat pribumi di Bogor pada abad ke-17, yang hidup di pedalaman pedesaan secara umum bermata pencaharian sebagai penanam padi, biji-bijian dan buah-buahan, yang dilakukan dalam bentuk tanah ladang dan sawah. Golongan ini merupakan tulang punggung bagi penghidupan ekonomi di wilayah Bogor (ANRI, 1978: LV). Tanpa keberadaan masyarakat kecil tersebut, sangat kecil kemungkinan perekonomian dengan model organisasi produksi tradisional tersebut akan berjalan lancar. Oleh karena itu tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan, golongan bawah menjadi tulang punggung bagi kehidupan perekonomian di wilayah Bogor (Scott, 1981: 58). Jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa secara penuh di tanah Bogor, model organisasi produksi dari masyarakat di Bogor memiliki pola seperti yang dijelaskan di atas. Organisasi produksi dengan model kepemilikan alat produksi (tanah) oleh pemegang kekuasaan tradisional, bahkan berjalan dan berlangsung pula hingga saat pemerintah kolonial Hindia-Belanda berkuasa secara penuh di wilayah Bogor.

Masuknya kepentingan ekonomi asing ke dalam wilayah Bogor pada abad ke-17 tidak lepas dari penetrasi ekonomi dan politik kolonial yang dilakukan oleh kongsi dagang VOC. Terbentuknya Sunda Kalapa (Batavia) sebagai salah satu pusat perekonomian dan perdagangan di wilayah pesisir utara Jawa, memberikan konsekuensi berupa ekspansi ekonomis ke wilayah di sekitarnya (salah satu diantaranya ialah wilayah Bogor). Lebih lanjut peralihan kebijakan ekonomi kolonial dari penguasaan yang bersifat monopolistik, menjadi kebijakan produksi tanaman komoditi, ikut pula mengantarkan perubahan mode produksi khususnya di wilayah Bogor (Sajogyo, 1982: 92).

Perluasan varian tanaman komoditi perdagangan sebagai konsekuensi permintaan pasar internasional yang semakin berkembang dan berubah-ubah, memaksa Nusantara untuk tidak hanya menghasilkan rempah-rempah dan palawija. Beberapa tanaman komoditi seperti : kopi, teh, kopra, tebu, tembakau dan beras menjadi jenis-jenis tanaman yang sangat digemari dan menjadi primadona, bahkan hingga masa akhir pemerintahan kolonial di Nusantara. Khususnya untuk wilayah Bogor,

tanaman komoditi yang berkembang dan cukup menguntungkan untuk diusahakan ialah tanaman teh. Secara aspek geografis dan klimatologi, wilayah Bogor (Priangan) merupakan daerah yang cukup baik untuk dapat menanam dan mengembangkan tanaman komoditi teh. Tanaman teh pertama kali dibawa ke wilayah Bogor oleh Andreas Clyer seorang berkebangsaan Jerman, pada tahun 1648 (Suganda, 1981: 3).

Pengusahaan Perkebunan Teh oleh Pemerintah Kolonial di Bogor

Setelah pemerintah kolonial mengambil upaya penanaman komoditi teh dari pihak swasta (dalam hal ini pihak swasta sering kali dikenal dengan nama *Preanger Planters*), pemerintah kolonial bergerak cepat dengan menugaskan Jacobus Isidorus loudewijk Levian Jacobson, seorang ahli dan pakar penguji teh di *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Jacobson kemudian diangkat menjadi inspektur budi daya teh pada dinas pemerintahan kolonial (Suganda, 1981: 4). Kebijakan lain yang ditempuh oleh pemerintah kolonial dalam menyelenggarakan industri perkebunan teh, ialah dengan membuat keputusan berupa Resolusi 5 November 1834 No. 3, yang menetapkan mengenai mobilisasi dan pengerahan tenaga penduduk dalam mendukung industri perkebunan teh (Padmo, 2004: 154).

Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pekerja pada perkebunan teh, pemerintah kolonial juga melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari Cina. Tenaga kerja yang berasal Cina direkrut oleh pemerintah kolonial sebagai tenaga ahli dalam proses pengolahan teh, mendampingi masyarakat pribumi yang dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di perkebunan teh (Suganda, 1981:4). Para pekerja yang berasal dari Macau (Cina) tersebut direkrut oleh Jacobson, pada tanggal 1 Maret 1838 dari Batavia dengan tugas sebagai penangkar teh, dan diberikan gaji sebesar f.10.- sebulan. Selain itu, Jacobson juga membawa serta 7.000.000 bibit teh untuk dikembangkan di perkebunan teh yang ada di seluruh Jawa, salah satunya ialah perkebunan teh yang ada di Cipanas-Bogor.

Seiring dioperasikannya perkebunan-perkebunan teh di seluruh Jawa, termasuk di Cipanas-Bogor, sejatinya kualitas teh yang

berasal dari tanah Priangan memiliki kualitas yang lebih baik dari teh yang berasal dari perkebunan di daerah Jawa lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Padmo (2004) berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Jacobson di beberapa tempat, teh yang berasal dari perkebunan teh di daerah Priangan-Jawa Barat memiliki kualitas teh yang lebih baik dibandingkan teh yang berasal dari teh di Wonosobo. Pengawasan yang ketat dan manajemen produksi yang baik menjadi salah satu faktor yang membuat kualitas teh yang berasal dari tanah Priangan lebih baik dari teh yang berasal dari perkebunan lainnya di Jawa. Penyediaan para petugas pengawas (*controleur*) yang berasal dari Eropa, ditambah dengan para pekerja yang berasal dari Cina, sebagai tenaga penangkar teh merupakan bagian dari strategi pemerintah kolonial yang utama dalam produksi teh di Priangan.

Demi mendapatkan hasil yang terbaik bagi kualitas teh, pemerintah kolonial juga melakukan mobilisasi yang cukup besar pula dalam hal tenaga kerja (buruh) yang bekerja sebagai pemetik teh. Sebagai gambaran untuk melihat besarnya mobilisasi pekerja dalam produksi teh di daerah Priangan, sebagai berikut adalah data mengenai gambaran perkebunan teh di Jawa (Padmo, 2004: 161):

”Areal perkebunan teh yang diusahakan oleh perkebunan teh sepanjang kurun waktu 1835-1840 adalah rata-rata seluas 500 bau, dengan 2.345.960 rumpun tanaman teh, dimana 707.460 untuk mengembangkan produksi teh hitam. Tiga pabrik pengolahan teh yang besar masing-masing memerlukan 200.000 rumpun pohon teh dan 17 pabrik pengolahan teh yang kecil dimana masing-masing bisa menampung sebanyak 100.000 rumpun tanaman teh. Kemudian teh kering yang dihasilkan oleh 20 pabrik pengolahan tersebut ditampung dalam empat gudang pengepakan”.

Berdasarkan penjelasan Soegijanto Padmo mengenai *mapping* industri perkebunan teh di Jawa, maka dapat difafsirkan bahwa perkebunan teh yang berada di Cipanas (Bogor) merupakan salah satu dari wilayah penanaman teh dan penangkaran teh yang berada di Jawa Barat, di bawah pabrik utama (20 pabrik utama) pengolahan yang berada di *afdeling* Sukabumi. Pengelolaan perkebunan yang dilakukan dengan ketat dan manajerial yang cukup baik, serta mobilisasi penduduk yang kemudian diberikan kompensasi gaji dalam pekerjaan memetik,

pengolahan dan pengepakan teh, menjadikan secara ringkas pengusaha perkebunan teh yang dilakukan oleh pemerintah hingga masa akhir dekade abad ke-19.

Pada sisi lain pengusaha teh yang dilakukan oleh pemerintah kolonial secara baik ternyata tidak memberikan hasil yang positif di satu sisi yang lainnya. Kualitas teh yang diusahakan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda ternyata masih sangat jauh dari yang diharapkan, jika dibandingkan dengan teh yang berasal dari India, Cina dan Jepang. Pasar internasional kurang mengakomodasi kualitas teh yang dihasilkan dari Hindia-Belanda, dan hal ini berdampak pada permintaan teh dari Hindia-Belanda dalam pasar internasional (Leirissa, *et al.*, 1996: 60). Kelesuan pasar internasional terhadap komoditi teh yang berasal dari Hindia-Belanda, berdampak pada produksi teh yang diusahakan oleh pemerintah. Pengeluaran (*cost* produksi) yang ditanggung oleh pemerintah kolonial bertambah besar, sementara itu daya jual komoditi teh dari Hindia-Belanda melemah.

Periode Swastanisasi Pengusahaan Perkebunan Teh di Bogor

Kartodirdjo (1972) menyatakan bahwa beralihnya haluan kebijakan ekonomi negeri induk yang semula dikuasai oleh kelompok konservatif, kemudian menuju kebijakan liberal, yang dikendalikan oleh golongan liberal merupakan satu situasi yang kelak juga mempengaruhi kebijakan ekonomi-politik di Hindia-Belanda. Kegagalan pemerintah kolonial dalam mengelola tanah jajahan dan rendahnya kemampuan daya saing ekonomi Kerajaan Belanda, dalam pasar internasional membuat angin politik beralih kepada golongan liberal. Pada tahun 1870-an merupakan satu era dimana berakhirnya kebijakan politik konservatif yang termanifestasi dalam bentuk kebijakan tanam paksa (*culturstelsel*). Berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial No. 5 tanggal 1 Mei 1864, pemerintah kolonial mulai merubah status perkebunan teh yang dikuasai oleh pemerintah kolonial kepada pihak swasta (Maddison, *et al.*, 1989: 20).

Akuisisi status perkebunan ke arah swastanisasi ini menjadi satu periode tersendiri dari sejarah perkebunan di Indonesia. Perubahan ini diawali dengan kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang

mengeluarkan UU Agraria (*Agrarische wet Staatblad*) tahun 1870, dimana undang-undang tersebut tidak hanya melepaskan separuh beban pemerintah kolonial dalam pembiayaan aktivitas ekonomi di Hindia-Belanda, akan tetapi di satu sisi juga memberikan ruang untuk mengakomodasi kepentingan kongsi dagang dari Barat untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan (Suganda, 1981: 10).

Masuknya modal-modal dari Barat ke dalam usaha perkebunan teh di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cipanas-Bogor tidak hanya merubah status perkebunan semata, akan tetapi kelak juga akan merubah status tanah penduduk dan bentuk-bentuk hubungan sosial yang berlaku. Berikut terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai proses swastanisasi perkebunan teh yang terjadi di seluruh wilayah Priangan, khususnya di wilayah Cipanas-Bogor, sebagai wilayah perkebunan teh yang berada dalam naungan *afdeling* Sukabumi.

Sejatinya proses pengelolaan perkebunan teh yang bersandar pada usaha swasta pertama kali dilakukan di daerah Priangan Tengah, yakni sekitar wilayah Bandung. Para pemodal atau pengusaha dari Barat yang ingin terlibat dalam usaha perkebunan teh di wilayah Priangan mengajukan permohonan dan mengurus seluruh keperluan administrasi kepada residen Priangan. Beberapa perusahaan yang kemudian masuk ke dalam wilayah Priangan untuk terlibat dalam bisnis perkebunan teh, diantaranya yang cukup dikenal ialah :

1. Keluarga pengusaha Rudolph Albert Kerkhoven yang membuka perkebunan teh di Arjasari pada tahun 1869.
2. Karel Albert Rudolf Bosscha yang dikenal sebagai raja teh Priangan, ia tiba di Jawa pada tahun 1887.
3. Karel Frederick Holle, seorang pengusaha teh yang membuka perkebunan di wilayah kaki Gunung Cikuray.

Para pengusaha yang masuk ke dalam wilayah Priangan tersebut, membuka usaha perkebunan teh atas seizin pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Mereka tidak hanya melakukan akuisisi terhadap beberapa pabrik teh, akan tetapi juga melakukan penyewaan terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara (pemerintah kolonial) dan tanah-tanah yang dimiliki oleh penduduk (perseorangan). Kebutuhan akan tanah-tanah sewaan guna

membangun industri perkebunan di wilayah Priangan semakin meningkat permintaannya.

Perkebunan teh Cipanas-Bogor yang berada dalam wilayah *afdeling* Sukabumi, merupakan tempat bernaungnya 474 perusahaan perkebunan, diantaranya adalah perkebunan teh, kina, dan karet. Selain itu juga terdapat beberapa perkebunan dengan komoditi seperti : coklat, kapuk, kelapa, lada dan kopi, dengan masa sewa guna tanah selama 20 tahun sampai 75 tahun (Padmo, 2004: 167). Masuknya modal ke dalam seluruh wilayah Priangan, khususnya di wilayah Cipanas-Bogor (*afdeling* Sukabumi), membuat perubahan morfologi kota, tidak hanya perubahan ekologi dalam bentuk perubahan pemanfaatan tanah dari kebutuhan primer penduduk pribumi, menuju tanah yang diusahakan sebagai areal perkebunan.

Masuknya modal perkebunan menuntut adaptasi kebutuhan infrastruktur daerah, seperti keberadaan penunjang transportasi (jalan, kendaraan, alat angkut), saluran pengairan (irigasi), pemukiman penduduk, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta beberapa fasilitas lainnya (Dick, *et al.*, 2002: 35). Guna membangun seluruh keperluan infrastruktur tersebut, dibutuhkan lembaga pembiayaan yang ditugaskan tidak hanya dalam rangka membiayai industri perkebunan swasta, akan tetapi juga membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah.

Periode mengenai swastanisasi perkebunan teh di wilayah Cipanas-Bogor mencapai puncaknya seiring dengan pembangunan jalur transportasi yang membentang dan menghubungkan antara daerah Cipanas-Bogor dengan Batavia, Sukabumi, dan wilayah Priangan Tengah seperti Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut. Jalur transportasi tersebut dikenal dengan nama jalan Anyer-Priangan, selain itu juga dibangun jalur kereta api Bogor-Bandung-Cicalengka-Cilacap (ANRI, 1980: LXXI). Di sepanjang jalan raya tersebut dibangun fasilitas-fasilitas umum seperti rumah/pemukiman penduduk, tangsi-tangsi militer, kantor pemerintahan, kantor swasta, rumah sakit, sarana pendidikan dan lain sebagainya.

Adaptasi Penduduk Pribumi terhadap Pengusahaan Perkebunan Teh di Bogor dan Perubahan-perubahan Lanjutan

Masuknya modal dari Barat kedalam

perkebunan teh di Cipanas-Bogor dan beberapa tempat perkebunan teh lainnya di Jawa diawali dengan perjanjian sewa dan jual beli antara calon pengusaha dengan pemerintah kolonial Hindia-Belanda (Departmen van Landbouw en Economische Zaken, 1920). Mengenai berapa luas tanah yang disewakan oleh pemerintah kolonial terhadap para calon pengusaha di Cipanas-Bogor, tim peneliti tidak mendapatkan angka yang pasti. Data yang didapatkan dalam penelitian ini hanya jumlah luas tanah yang disewakan dalam wilayah *afdeeling* Sukabumi, dimana Cipanas-Bogor masuk dalam otonomi *afdeeling* Sukabumi. Peningkatan jumlah permintaan sewa tanah yang terjadi di wilayah *afdeeling* Sukabumi, termasuk di dalamnya wilayah Cipanas-Bogor, menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi industri perkebunan teh di wilayah Priangan Barat ini. Guna memenuhi kebutuhan dan permintaan tanah sebagai lahan produktif perkebunan teh, pemerintah kolonial melakukan beberapa cara. *Pertama*, membuka lahan baru (pembukaan lahan hutan yang difungsikan menjadi lahan perkebunan baru); *kedua*, mengakuisisi tanah-tanah yang bermasalah, menjadi tanah milik Negara (*Staatsblad* 1912 No. 177 dan 178). Selain angka jumlah perusahaan perkebunan swasta yang meningkat, keberadaan industri perkebunan teh, dapat menjadi jalan bagi para penduduk Cipanas-Bogor untuk mendapatkan tambahan pendapatan rumah tangga mereka (ANRI, 1980: LXXIV). Tambahan pendapatan tersebut didapatkan masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu rumah tangga yang menjadi pekerja pemetik daun teh di perkebunan (Suganda, 1981: 149).

Masyarakat pribumi di daerah Cipanas-Bogor, selain dapat bekerja langsung pada perusahaan perkebunan teh, juga dapat terintegrasi secara tidak langsung untuk mendapatkan tambahan pendapatan mereka. Aktivitas penambahan pendapatan mereka dapat dilakukan dengan menanam bibit-bibit teh di pekarangan rumah mereka, setelah itu hasilnya mereka jual kepada perusahaan (ANRI, 1980: LXXIV). Derasnya ekspansi ekonomi kapitalisme kolonial ke dalam jantung ekonomi masyarakat pribumi di seluruh wilayah Priangan, khususnya Cipanas-Bogor sejatinya tidak membuat masyarakat pribumi kehilangan sumber-sumber mata pencaharian mereka. Para petani masih juga mengelola ekonomi rumah tangga mereka dengan bertani

dan memelihara ikan di areal pekarangan rumah mereka.

Pertumbuhan aktivitas penanaman dan perdagangan tanaman komoditi teh dapat dilihat melalui perkembangan permintaan tanah sebagai lahan produksi. Selain itu juga dapat dilihat dari terbangunnya suprastruktur dan infrastruktur penunjang industrialisasi perkebunan teh. Perkembangan infrastruktur dan suprastruktur dalam konteks sebuah wilayah memberikan satu kesempatan pula bagi wilayah itu sendiri untuk siap terintegrasi dengan dunia luar. Terintegrasinya suatu wilayah sebagai konsekuensi logis perkembangan kehidupan sosial-ekonomi merupakan satu perkembangan lanjutan yang dihadapi oleh wilayah Cipanas-Bogor menuju dekade 1930-an (ANRI, 1980: CXIX). Pembangunan infrastruktur jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah-wilayah di Priangan dengan wilayah luar Priangan memberikan kesempatan bagi hilir-mudiknya lalu lintas barang dan manusia (ANRI, 1980: LXXI). Hasil-hasil produksi perkebunan di seluruh wilayah Priangan memerlukan akses transportasi yang baik dalam memudahkan pengangkutan menuju wilayah pelabuhan, sebagai mata rantai jalur ekspor dari Hindia-Belanda. Di sisi lain keberadaan jalur transportasi beserta penopang lainnya menjadi jalur bagi masuknya barang-barang impor ke dalam wilayah Priangan.

Terbukanya pintu akses menuju, dari dan ke wilayah Priangan menghadirkan pengaruh terhadap dinamisnya kehidupan sosial masyarakat Priangan. Kedatangan para pendatang ke wilayah Priangan, khususnya Cipanas-Bogor menjadi satu fenomena yang selalu mengisi dinamika kehidupan sosial wilayah Priangan Barat tersebut (ANRI, 1980: LXXX). Kedatangan para kaum urban yang terdiri dari Eropa, Timur Tengah, Cina, India hingga masyarakat pribumi yang berasal dari luar Priangan memberikan pengaruh dalam konteks kebutuhan pemukiman, kesehatan, pendidikan dan permintaan tambahan atas kebutuhan tanah yang produktif.

Kehadiran para pendatang tersebut memberikan satu masalah tersendiri bagi perkembangan kehidupan sosial di wilayah Priangan Barat (Cipanas-Bogor), karena kehadiran mereka bukan hanya bermukim, akan tetapi juga mencoba peruntungan dalam sektor ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Residen

Priangan L. de Steurs (ANRI, 1980: LIII), bahwa seiring lajunya pertambahan penduduk melalui fenomena migrasi terjadi peningkatan permohonan pengajuan usaha pertanian kecil.

Kedatangan pemodal besar dan kecil dari golongan Eropa yang menyisakan persoalan mengenai tanah sewa (partikelir) yang ilegal, menjadi persoalan yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah kolonial (ANRI, 1980: CXXI). Persoalan mengenai perubahan tanah dari semula tanah perseorangan warga, menjadi tanah sewaan merupakan fenomena yang banyak dijumpai pada masa era swastanisasi perkebunan di Priangan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pemerintah kolonial telah membuat badan berupa perkumpulan tanah partikelir untuk menyelesaikan persoalan tanah sewaan yang bermasalah (*Staatsblad* 23 November 1933, No.2).

Tanah partikelir yang muncul sejak akhir abad ke-19, hingga menuju masa akhir pemerintah kolonial Hindia-Belanda, merupakan modal utama bagi pembentukan industri perkebunan. Dengan beralihnya model ekonomi subsisten menuju model ekonomi industri, sudah barang tentu pula merubah hubungan-hubungan sosial yang menjadi tali-temali dalam proses jalinan relasi produksi. Jika dalam proses aktivitas ekonomis dalam bentuk mode ekonomi subsisten, jalinan relasi sosial-produksi yang terbingkai adalah antara pemilik tanah (*land lord*) dengan petani hamba, maka pada masa industri perkebunan hubungan relasi produksi berubah menjadi antara pengusaha (penyewa tanah) dengan petani penggarap tanah. Ikatan-katan relasi sosial yang berbentuk *patron-client*, berubah menjadi pengusaha dan buruh. Jelas perubahan ini memberikan dampak yang cukup besar, dimana pada fase ini disebut oleh beberapa ahli sejarah sebagai fase dimana runtuhnya pelebagaan tradisional.

SIMPULAN

Bahwa secara geologis tanah yang subur dengan perpaduan dataran rendah daerah pegunungan serta banyaknya aliran air dalam bentuk mata air dan sungai, menjadikan daerah Bogor berkelimpahan atas hasil bumi yang besar. Hal itu menjadi modal utama untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat setempat dalam bentuk : berladang, beternak serta aktivitas ekonominya. Tahun 1869 di Jawa

Barat ini membuktikan bahwa sebagian besar desa-desa di sepanjang daerah Jawa bagian Barat tanah yang dimiliki perseorangan jauh lebih banyak dan luas dari pada tanah yang dimiliki secara komunal. Stratifikasi sosial dalam masyarakat tradisional Bogor yang juga termasuk dalam masyarakat Jawa Barat, terbentuk atas dasar nilai-nilai dan pengetahuan yang bersumber dari sistem nilai agama Hindu, dan juga mengadopsi nilai-nilai agama Islam.

Peralihan kebijakan ekonomi kolonial dari penguasaan yang bersifat monopolistik, menjadi kebijakan produksi tanaman komoditi, ikut mengantarkan perubahan mode produksi khususnya di wilayah Bogor. Khususnya untuk wilayah Bogor, tanaman komoditi yang berkembang dan cukup menguntungkan untuk diusahakan ialah tanaman teh. Secara aspek geografis dan klimatologi, wilayah Bogor (Priangan) merupakan daerah yang cukup baik untuk dapat menanam dan mengembangkan tanaman komoditi teh.

Proses swastanisasi perkebunan teh yang terjadi di seluruh wilayah Priangan, khususnya di wilayah Cipanas-Bogor, sebagai wilayah perkebunan teh yang berada dalam naungan *afdeling* Sukabumi. Selain angka jumlah perusahaan perkebunan swasta yang meningkat, keberadaan industri perkebunan teh, dapat menjadi jalan bagi para penduduk Cipanas-Bogor untuk mendapatkan tambahan pendapatan rumah tangga mereka. Seain itu pula terbangunnya suprastruktur dan infrastruktur penunjang industrialisasi perkebunan teh. Perkembangan infrastruktur dan suprastruktur dalam konteks sebuah wilayah memberikan satu kesempatan pula bagi wilayah itu sendiri untuk siap terintegrasi dengan dunia luar. Dengan beralihnya model ekonomi subsisten menuju model ekonomi industri, merubah hubungan-hubungan sosial yang menjadi tali-temali dalam proses jalinan relasi produksi. Jika dalam proses aktivitas ekonomis dalam bentuk mode ekonomi subsisten, jalinan relasi sosial-produksi yang terbingkai adalah antara pemilik tanah (*land lord*) dengan petani hamba, maka pada masa industri perkebunan hubungan relasi produksi berubah menjadi antara pengusaha (penyewa tanah) dengan petani penggarap tanah.

SARAN

Kebijakan ekonomi perkebunan swasta masa kolonial adalah kesempatan yang dibuka oleh pemerintah kolonial setelah masa tanam paksa di berbagai daerah di Hindia Belanda salah satunya adalah perkebunan teh di Bogor. Tidak hanya perkebunan teh sebagai komoditi ekspor tetapi juga berbagai macam komoditi lain seperti tembakau, kelapa sawit, gula, dan sebagainya yang dijadikan perkebunan swasta. Perkebunan swasta itu pun tidak hanya berada di wilayah Jawa tapi juga menjangkau hingga ke timur wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian, kajian mengenai perkebunan swasta ini masih perlu digali kembali mengingat cakupan wilayah perkebunan swasta yang luas dan komoditi tanaman eksportnya pun beragam. Banyak yang dapat digali untuk penelitian selanjutnya, yang bisa dilihat dari aspek ekonomis, manajerial dari perusahaan tersebut, hubungan sosial dan keterkaitan dengan masyarakat setempat serta kesejahteraan sosial. Dengan penelitian-penelitian yang semakin terbuka mengenai tema ini diharapkan menjadi pembelajaran berharga bagi perkembangan perkebunan swasta di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1978. *Memori Serah Jabatan 1921-1930* (Jawa Barat).
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1998. *Otonomi Daerah Hindia-Belanda 1903-1940*.
- Burger, D.H. 1957. *Sejarah Sosiologi dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- _____ dan Parajudi. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I, Cetakan ketiga. Djakarta: Percetakan Negara Pradnjaparamita.
- Dick, H.W dan J. Thomas Lindblad (ed). 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM.
- Handboek van Ondernemingen en Handel in Nederlands-Indie*. 1920. Departmen van Landbouw en Economische Zaken.
- Harsojo dan Koentjaraningrat (ed). 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Kartodirdjo, Sartono . 1972. *Politik Kolonial Belanda Abad ke-19*. Yogyakarta: Lembaran Sejarah.
- Kuntowijoyo.2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Leirissa, R.Z, G.A. Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Maddison, Angus dan Ge Prince. 1989. *Economic Growth in Indonesia 1820—1940*. USA: Foris Publications.
- Padmo, Soegijanto. 2004. *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta : LP3ES.
- Staatsblad* 1912 No. 177 dan 178.
- Staatsblad* 23 November 1933, No.2.
- Suganda, Her.1981. *Kisah Para Preanger Planters*.Jakarta : Kompas.
- van Dooren, P.J, J.B.D. Derksen, *et al.* 1975. *Changing Economy in Indonesia Volume 1 Indonesia's Export Crops 1816—1940*. Amsterdam: The Hague Under the auspices of Royal Tropical Institute.
- Van Erden, J.H en W.B Deijs. 1946. *Thee CultuurerOndernemingen*.Gravenhage NV.Uitgeei.

